

ABSTRAK

Keberadaan PKL di Surabaya telah menyebar ke seluruh pelosok kota, namun ada kecenderungan para PKL memilih berkelompok dan menempati satu area atau lokasi tertentu seperti PKL pacuan kuda. Pemerintah kemudian ingin menghilangkan keberadaan PKL pacuan kuda dengan cara relokasi yang berlandaskan Perda Nomer 10 tahun 2000 tentang penggunaan jalan raya. Upaya relokasi tersebut mendapat penentangan dari pihak PKL pacuan kuda karena melanggar hak mereka sebagai masyarakat kota yang bebas menggunakan ruang publik untuk menunjang dan menjalankan berbagai aktivitasnya. Penegakan perda tersebut menunjukkan adanya sikap ketidaknetralan pemerintah karena tidak memihak kepada kalangan kelas bawah. Penelitian ini menggunakan teori ruang karena ruang adalah produk politik dan instrumen bagi perubahan sosial ekonomi bahkan keadaan politik sehingga ruang itu tidak netral dan pasif., dengan menggunakan metode penelitian kualitatif-deskriptif. Sumber data diperoleh dari wawancara dan didukung oleh data sekunder berupa buku, jurnal, berita dan Undang-undang. Hasil data yang ditemukan bahwa pemerintah ingin melakukan penegakan perda agar kota Surabaya terlihat bersih, rapi dan tertata dengan baik, sementara pihak PKL menolak karena merampas hak sebagai warga kota untuk menikmati ruang publik dan bisa mengurangi pendapatan mereka. Konflik tersebut disebabkan karena adanya pelanggaran perda oleh PKL dan para PKL menolak untuk dipindahkan, sementara pemerintah ingin mempertahankan prestasi kota Surabaya dengan cara menghilangkan PKL di kota Surabaya. Konflik tersebut belum sampai pada resolusi tapi kedua pihak memilih berkompromi sampai ditemukan keputusan yang jelas atas konflik tersebut.

Kata kunci: Ruang publik, Kepentingan, Relokasi, Penentangan, Konflik, Kompromi.

ABSTRACT

The existence of street vendors in Surabaya has spread to all corners of the city, but there is a tendency for street vendors to choose groups and occupy a certain area or location such as horse racing street vendors. The government then wants to eliminate the existence of horse racing street vendors using relocation based on Perda No. 10 of 2000 concerning the use of roads. The relocation effort received opposition from the horse racing street vendors for violating their rights as city people who are free to use public spaces to support and carry out their various activities. The enforcement of this regional regulation shows that the government has a neutral attitude because it does not take sides with the lower classes. This research uses space theory because space is a political product and an instrument for socio-economic change and even political conditions so that space is not neutral and passive, using qualitative-descriptive research methods. Sources of data were obtained from interviews and supported by secondary data in the form of books, journals, news, and laws. The results of the data show that the government wants to enforce local regulations so that the city of Surabaya looks clean, tidy and, well-ordered, while street vendors refuse because they are depriving citizens of their right to enjoy public space and reduce their income. The conflict was caused by violations of local regulations by street vendors and the street vendors refused to be transferred, while the government wanted to maintain the achievements of the city of Surabaya by eliminating street vendors in the city of Surabaya. The conflict has not yet reached a resolution, but the two parties chose to compromise until a clear decision was found on the conflict.

Keywords: Public space, Interests, Relocation, Opposition, Conflict, Compromise.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT dan junjungan besar Nabi Muhammad SAW atas segala rahmat dan hidayah-Nya yang telah diberikan kepada hamba-Nya. Peneliti sangat merasa bersyukur karena mampu menyelesaikan tugas akhir skripsi yang berjudul “Konflik Kepentingan Perebutan Ruang Publik Antara Pemerintah Dengan PKL Pacuan Kuda Di Kota Surabaya” dengan baik dan dapat melewati segala rintangan yang ada. Penelitian ini dilakukan atas dasar keingintahuan peneliti mengenai keberlangsungan kasus yang selama ini terjadi di sekitar peneliti mengenai perencanaan relokasi PKL yang ada di sepanjang jalan pacuan kuda.

Penelitian ini berfokus pada konflik yang terjadi antara para PKL pacuan kuda dengan pihak pemerintah dalam menolak upaya kebijakan relokasi dan penegakan Perda Kota Surabaya. Upaya ini kemudian mendapat berbagai penolakan dari pihak para PKL, walaupun penolakan itu tidak diaktuskan secara langsung melalui sebuah gerakan tetapi sikap para PKL menunjukkan penolakan dengan cara tetap bertahan berjualan hingga saat ini. Sementara pihak pemerintah terus melakukan upaya dengan berbagai cara, salah satunya dengan melakukan sidak setiap hari sehingga sepanjang jalan pacuan kuda bersih dari keberadaan para PKL. Kedua pihak masih tetap pada pendirian dan kepentingan masing-masing sehingga belum bisa menemukan keputusan yang adil diantara keduanya untuk bisa menyelesaikan masalah tersebut.

Peneliti mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah membantu dan meluangkan waktu untuk peneliti dalam proses menyelesaikan skripsi ini. Peneliti berharap agar skripsi ini bisa memberikan manfaat dan menambah wawasan dalam upaya memahami dan melihat berbagai fenomena yang ada di masyarakat yang menunjukkan adanya berbagai konflik akibat benturan kepentingan pihak-pihak tertentu sehingga bisa dijadikan lahan pembelajaran dan memahami realita di masyarakat. Peneliti juga mengharapkan adanya saran yang relevan dan dapat membangun serta menyempurnakan penelitian ini.

4 November 2020